

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa mengenai pelaksanaan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bandar Lampung yang dipermasalahkan oleh ahli waris debitur dalam perkara Nomor 31/PDT/2021/PT TJK. Permasalahan yang dikaji pelaksanaan eksekusi lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki keabsahan hukum serta perlindungan hukum bagi ahli waris dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hukum pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperoleh ahli waris debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan oleh BRI Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki keabsahan hukum karena dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial serta kewenangan *parate executie* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga menolak gugatan para penggugat karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum oleh bank. Perlindungan hukum yang diperoleh ahli waris bersifat represif melalui hak untuk mengajukan gugatan dan upaya hukum ke pengadilan guna menguji keabsahan tindakan kreditor. Namun, selama pelaksanaan lelang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ahli waris tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan lelang tersebut. Dengan demikian, kesimpulan eksekusi lelang yang dilakukan oleh BRI dinyatakan sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta perlindungan hukum represif yang diberikan kepada ahli waris.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi Lelang, Parate Executie, Ahli Waris, Perlindungan Hukum